

## DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KAWASAN SARBAGITA

Yogi Pratama Budiarto <sup>1</sup>  
I Nengah Kartika <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas EkonomidandanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan masyarakat Sustainable Development Goals (SDG's) salah satunya yaitu pengentasan kemiskinan disegala lapisan. Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2009 mencanangkan sebuah program yaitu sebuah kawasan elit Sarbagita Pada kawasan Sarbagita tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada selama lima tahun terakhir mengalami masa fluktuatif, namun dua tahun terakhir dibeberapa daerah mengalami peningkatan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai, (1) Untuk menganalisis pengaruh langsung belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, terhadap tingkat pengangguran di wilayah Sarbagita. (2) Untuk menganalisis pengaruh langsung belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah Sarbagita. (3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota, terhadap jumlah penduduk miskin melalui tingkat pengangguran di wilayah Sarbagita. Teknik analisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini yaitu (1) belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif (signifikan) secara langsung terhadap tingkat pengangguran pada kawasan Sarbagita. (2) belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif (signifikan) secara langsung terhadap tingkat kemiskinan pada kawasan Sarbagita. (3) Belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota pada kawasan Sarbagita berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran.

Kata kunci : *belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, tingkat pengangguran, tingkat pengangguran*

### ABSTRACT

*Sustainable Development Goals (SDG's) is poverty alleviation at all levels. Government of Bali in 2009 launched a program which is an elite area, hereinafter referred to as the Sarbagita. In the Sarbagita region, the unemployment and poverty on last two years in several regions have increased. The research objectives to be achieved, (1) To analyze the effect of capital expenditure, minimum wages, on the unemployment rate in the Sarbagita region. (2) To analyze the effect of capital expenditure, minimum wages, on the number of poor people in the Sarbagita region. (3) To analyze the effect of capital expenditure and minimum wages, on the number of poor people through the unemployment rate in the Sarbagita region. The analysis technique uses path analysis. The results of the study are (1) capital expenditure and minimum wages have a negative (significant) effect on the unemployment rate in the Sarbagita region. (2) capital expenditure, minimum wage, and unemployment rate have a negative (significant) effect on poverty levels in the Sarbagita region. (3) Capital expenditure and minimum wages in the Sarbagita region indirectly affect poverty levels through the unemployment rate.*

*Keywords: capital expenditure, minimum wage, unemployment rate, unemployment rate*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya adalah membangun manusia seutuhnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Murwanto, 2014). *Millennium Development Goals* (MDG's) yang ditandatangani di New York tahun 2000 merupakan awal tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut (Bappenas, 2007). Keberhasilan mencapai tujuan pada era MDGs, selanjutnya era SDG's (*Sustainable Development Goals*) dimulai dan dirancang untuk meneruskan capaian yang telah diraih oleh MDGs sebelumnya (Bagiada, 2017). SDG's memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan untuk mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan gender dan mengatasi perubahan iklim (Wahyuningsih, 2017).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan (Ikejiaku, 2009). Kemiskinan merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok yang ada dalam pembangunan ekonomi di dunia, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan program pembangunan ekonomi guna mempercepat laju pengentasan kemiskinan (Silva and Sumarto, 2014). Indonesia menjadi negara berkembang memiliki satu tantangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi. Menurut Dastidar (2012) pada penelitiannya menyatakan pada negara berkembang terjadi kondisi dimana sektor jasa dan industri lebih dominan dari sektor pertanian. Pada umumnya masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang yang penduduknya masih bekerja di bidang pertanian/informal, hal tersebut menyebabkan belum tingginya pendapatan masyarakat

yang menimbulkan tingginya tingkat kemiskinan (Yusuf *and* Andy Sumner, 2015). Pengentasan kemiskinan ini pula nantinya dapat memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah (Kaur, 2016).

Kemiskinan sebagai suatu penyakit yang harus segera diatasi oleh setiap daerah demi menunjang peningkatan pembangunan di tingkat nasional. Penanggulangan ini tentunya harus dilakukan mulai dari setiap daerah yang ada tidak terkecuali di Provinsi Bali, mengingat berkurangnya tingkat kemiskinan juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan baik daerah maupun nasional (Murdiansyah, 2014). Pentingnya pengentasan kemiskinan menjadi persoalan utama yang dibahas di seluruh dunia, yang dibuktikan dalam SDG's dengan dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Seluruh penjuru dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun (Ishartono dan Raharjo, 2016). Pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pembiayaan yang diberikan (Dalamagas *et al*, 2010).

Pemerintah Provinsi Bali menyusun peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 mengenai penataan ruang wilayah Kawasan Perkotaan Sarbagita (Kota Denpasar, Badung Gianyar, dan Tabanan) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang menerangkan bahwa penataan ruang kawasan perkotaan Sarbagita bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional yang

berlandaskan Budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana yang menyelaraskan semua hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya sehingga nantinya dapat dijadikan kawasan percontohan untuk kawasan lainnya. Kawasan Sarbagita meskipun dijadikan wilayah percontohan, masih memiliki tingkat penduduk miskin yang cukup tinggi, yang dapat sedikit digambarkan dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sarbagita Tahun 2013-2017 (persen)**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Tabanan</b>	5,21	5,61	5,52	5,00	4,92
<b>Badung</b>	2,46	2,54	2,33	2,06	2,06
<b>Gianyar</b>	4,27	4,57	4,61	4,44	4,46
<b>Denpasar</b>	2,07	2,21	2,39	2,15	2,27
<b>Provinsi Bali</b>	<b>4,49</b>	<b>4,76</b>	<b>4,74</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019*

Pada Tabel 1 dapat diketahui pada wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) sebagai wilayah percontohan masih memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan jumlah persentase penduduk miskin Provinsi Bali terutama pada Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Persentase penduduk miskin pada Kota Denpasar yaitu sebesar 2,27 persen, Kabupaten Badung yaitu sebesar 2,06 persen, Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 4,46 persen,

Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 4,92 persen pada tahun 2017. Tingkat persentase ini masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan tingkat persentase Provinsi Bali sebesar 4,25 persen. Wilayah Sarbagita yang merupakan wilayah berintegrasi dan di golongan di dalam kawasan metropolitan sehingga menjadi wilayah percontohan dalam pembangunan dan kesejahteraannya paling tinggi, ternyata pada wilayah ini persentase penduduk miskin bahkan masih ada yang di atas rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Bali.

Permasalahan kemiskinan tentunya disebabkan dari banyak faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, disparitas distribusi pendapatan (Dao, 2013), selain itu besarnya tingkat pengangguran di suatu daerah dapat menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan (Yasa dan Arka, 2015). Pengangguran merupakan permasalahan yang sangat sulit dipecahkan disetiap Negara maupun suatu daerah, karena pengangguran ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas yang tinggi, gejala sosial dan politik (Yanthi, 2015). Wilayah Sarbagita yang menjadi wilayah percontohan ternyata masih memiliki tingkat pengangguran yang berada diatas tingkat pengangguran Provinsi Bali hanya sebesar 1,48 persen pada tahun 2017. Tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir pada wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) masih memiliki persentase tingkat pengangguran yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan persentase tingkat pengangguran Provinsi Bali. Persentase tingkat pengangguran tersebut dapat digambarkan melalui Tabel 2.

**Tabel 2. Persentase Tingkat Pengangguran di Wilayah Sarbagita Tahun 2013-2017 (persen)**

Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Tabanan</b>	0,8	2,25	1,73	1,73	1,79
<b>Badung</b>	0,8	0,48	0,34	0,34	0,48
<b>Gianyar</b>	2,23	1,43	1,93	1,93	1,02
<b>Denpasar</b>	2,72	2,32	3,54	3,54	2,63
<b>Provinsi Bali</b>	<b>1,83</b>	<b>1,9</b>	<b>1,99</b>	<b>1,89</b>	<b>1,48</b>

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019*

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran pada tahun 2017 di Kota Denpasar yaitu 2,63 persen, Kabupaten Badung yaitu 0,48 persen, Kabupaten Gianyar yaitu 1,02 persen, Kabupaten Tabanan yaitu 1,79 persen. Tingkat persentase ini masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan tingkat persentase Provinsi Bali sebesar 1,48 persen terutama untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan. Masih tingginya tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan nantinya, sehingga perlu adanya dorongan dari pemerintah misalnya seperti terbukanya lapangan pekerjaan melalui pengeluaran belanja modal yang telah dianggarkan.

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk kepentingan publik dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembuatan infrastruktur yang dapat

meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto, dkk (2016) menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif. Hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang negatif berarti dengan pengalokasian belanja modal yang tepat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat (Kusuma, 2016). Belanja modal menjadi salah satu pengeluaran terpenting untuk menunjang aktifitas perekonomian tersebut. Data belanja modal pada kawasan Sarbagita dalam lima tahun terakhir dapat digambarkan pada Tabel 3.

**Tabel 3 Data Belanja Modal di Wilayah Sarbagita Tahun 2013-2017 (miliar)**

Kabupaten/Kota	Data Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Tabanan</b>	128,19	136,34	112,97	257,06	290,57
<b>Badung</b>	766,71	949,07	922,77	1,195,12	1,241,11
<b>Gianyar</b>	185,32	201,18	224,18	309,92	409,36
<b>Denpasar</b>	254,01	234,042	192,32	257,67	251,62
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2,090,37</b>	<b>2,318,70</b>	<b>2,192,70</b>	<b>3,390,29</b>	<b>660,433</b>

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019*

Tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya belanja modal yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2017 di Kota Denpasar yaitu 251,62 miliar, Kabupaten Badung yaitu 1,241,11 miliar, Kabupaten Gianyar yaitu 409,36 miliar, Kabupaten Tabanan yaitu 290,57 miliar. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal ini diprioritaskan dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pembukaan lapangan kerja, hal tersebut dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun dan diperolehnya penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat (Santi, 2016). Akonji *et al.* (2013) yang menyatakan belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Salih (2012), menambahkan bahwa pengeluaran publik harus digunakan tepat sasaran misalnya dalam pembukaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang banyak nantinya diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada. Pembukaan lapangan pekerjaan dengan skala yang banyak tentunya memberikan harapan yang besar bagi para pekerja untuk mendapatkan gaji yang sesuai sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan secara layak. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah menetapkan besaran minimal upah yang harus diberikan pada para pekerja baik pada tingkat nasional maupun regional.

Penentuan upah minimum di setiap kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa upah minimum digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya sehingga nantinya para pekerja diharapkan dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan harapan tenaga kerja nantinya dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum melalui penetapan upah tersebut. Dalam Rustariyuni (2014) Hariwan dan Swaningrum pada penelitiannya menyatakan bahwa *Human Development Index* (HDI) salah satu di dalamnya terdapat indikator pendapatan perkapita telah diterima secara luas sebagai ukuran tingkat kesejahteraan manusia. Pemberian UMK setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan meskipun pada daerah-daerah yang belum memiliki PAD yang begitu besar.

Agustina (2010) mengemukakan bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Pada saat yang bersamaan perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara pengurangan tenaga kerja. Menurut (Manning, Chris dan P.N. Junankar, 1998) pada awal masa pembangunan sering disampaikan bahwa masyarakat miskin karena kurangnya keahlian dan pengetahuan mengakibatkan kurang dapat bersaing pada era yang baru berkembang sehingga tidak dapat beradaptasi yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan salah satunya peningkatan upah minimum yang akan diberikan kepada tenaga kerja di setiap daerahnya. Perkembangan tingkat upah pada kawasan Sarbagita dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4 Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Tahun 2013-2017 (juta rupiah)**

Kabupaten/Kota	Data Upah Minimum Kabupaten/Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Tabanan</b>	1,250	1,542	1,706	1,902	2,059
<b>Badung</b>	1,401	1,728	1,905	2,124	2,299
<b>Gianyar</b>	1,230	1,543	1,707	1,904	2,061
<b>Denpasar</b>	1,358	1,656	1,800	2,007	2,173
<b>Provinsi Bali</b>	<b>1,181</b>	<b>1,542</b>	<b>1,621</b>	<b>1,807</b>	<b>1,956</b>

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019*

Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya UMK yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2017 di Kota Denpasar yaitu 2.173.000 juta rupiah, Kabupaten Badung yaitu 2.299.000 juta rupiah, Kabupaten Gianyar yaitu 2.061.000 juta rupiah, Kabupaten Tabanan yaitu 2,059 juta rupiah. Besarnya UMK pada wilayah Sarbagita ini masih tidak terpaut jauh dari kabupaten lainnya salah satunya dengan Kabupaten Karangasem (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019).

Upah yang diberikan merupakan cerminan dari PAD kabupaten tersebut yang nantinya diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan (Putra,2018). Angka pengangguran yang meningkat mengakibatkan sumber daya dan potensi angkatan kerja menjadi boros, sumber dari kemiskinan adalah meningkatnya beban masyarakat (Depnakertrans, 2004). Pasar tenaga kerja juga merupakan bagian integral dari ekonomi pasar yang nantinya dapat memberikan dampak secara langsung untuk masyarakat salah satunya dari besarnya pendapatan perkapita yang didapat (Martinkus *et al.*, 2009). Pemerintah mengharapkan dengan adanya peningkatan upah

minimum di setiap kabupaten kota terutama di wilayah Sarbagita dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, terhadap tingkat pengangguran di wilayah Sarbagita; 2) Untuk menganalisis pengaruh belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah Sarbagita; 3) Untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota, terhadap jumlah penduduk miskin melalui tingkat pengangguran di wilayah Sarbagita.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif dengan bentuk hubungan kausal dari tahun 2005-2017. Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui peran belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kawasan Sarbagita. Lokasi penelitian dilakukan pada kawasan Sarbagita (Danpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) dengan menggunakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Bali dan dinas yang terkait dengan obyek penelitian. Konsep penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal, upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di kawasan Sarbagita. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang diukur dengan satuan persen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja modal, upah minimum kabupaten/kota di kawasan Sarbagita. Dalam penelitian ini juga digunakan variabel intervening yakni

tingkat pengangguran yang diukur dengan satuan persen. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah percontohan Sarbagita, mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran guna mengurangi masalah tersebut.

Halim (2004:73) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Proporsi belanja modal jika lebih besar dari belanja rutin, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan efektif sehingga fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat pun meningkat dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di masyarakat. Kresnandra (2013) mengatakan bahwa dalam penelitiannya yang dilakukannya bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran.

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk kepentingan publik dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembuatan infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto, dkk (2016), menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaannya juga memerlukan tenaga kerja, sehingga hal tersebut dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun dan diperolehnya penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan

kesejahteraan masyarakat (Santi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yustie dan Hariqbalidi (2014) dan Kotambunan (2016), menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini terjadi karena kurang optimalnya program pembangunan pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal guna memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut (Zakaria, 2015).

Dalam upaya untuk memperkecil tingkat pengangguran pemerintah merangsang pencari kerja dengan cara peningkatan upah/gaji disetiap tahunnya. Pemberian upah ini terdapat perbedaan di setiap kabupaten/kota, hal ini disebabkan adanya perbedaan PAD disetiap kabupaten/kota. Tingkat upah memegang peranan yang sangat besar dalam kondisi ketenagakerjaan karena tingkat upah yang berlaku akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga dapat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena naiknya upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang akan menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan yaitu pengangguran (Mankiw, 2000:140).

Penawaran tenaga kerja hal ini akan berdampak baik dikarenakan angkatan kerja akan lebih bersemangat untuk mendaftarkan diri untuk bekerja, tetapi jika dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, dikarenakan perusahaan justru akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja hal tersebut dilakukan mengingat gaji/upah karyawan yang tinggi akan menambah beban pengeluaran perusahaan. Hasil penelitian Kristiyana

(2011), menunjukkan bahwa upah minimum kota berpengaruh positif terhadap pengangguran. Penelitian Kurniawan (2013), upah minimum kota memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran.

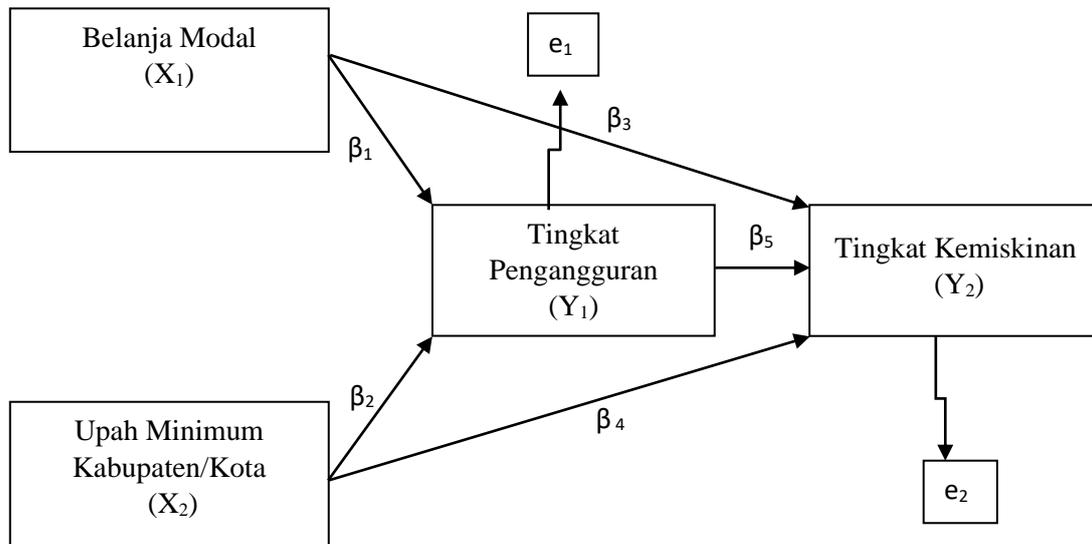
Menurut Khabhibi (2013), tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat upah minimum akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Peran pekerja/buruh pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Bila adanya pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Anggriawan (2016) yang menunjukkan bahwa variabel upah minimum positif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Ningrum (2017) yaitu upah minimum memberikan pengaruh yang positif terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat kemiskinan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Myanti Astrini (2013) dalam penelitiannya tentang Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Adapun hasil penelitiannya

yaitu menunjukkan bahwa pengangguran yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan kata lain, jika pengangguran semakin rendah maka kemiskinan juga akan menurun.

Menurut Sukirno (2006:14), pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, dan masalah social lainnya. Menurut Sukirno (2004:360) pengangguran yang terjadi pada suatu wilayah akan menyebabkan peningkatan kemiskinan, karena individu yang menganggur akan kehilangan pendapatannya sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara berada dalam kondisi yang sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku sehingga akan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian hubungan antar variabel sebagai berikut:



Sumber : penulis, 2019

**Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Determinan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kawasan Sarbagita**

Anak panah  $e_1$  variabel tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) menunjukkan jumlah variansi variable tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) yang tidak dijelaskan oleh belanja modal ( $X_1$ ) dan upah minimum kabupaten/kota ( $X_2$ ). Anak panah  $e_2$  variabel tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) menunjukkan jumlah variansi variable tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) yang tidak dijelaskan oleh belanja modal ( $X_1$ ) dan upah minimum kabupaten/kota ( $X_2$ ), dan tingkat pengangguran ( $Y_1$ ). nilai kekeliruan standar taksiran (*standard error of estimate*) untuk  $e_1$  yaitu:

$$e_1 = \sqrt{(1 - R_1^2)} \dots\dots\dots(1)$$

nilai kekeliruan standar taksiran (*standard error of estimate*) untuk  $e_2$  yaitu:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R_2^2)} \dots\dots\dots(2)$$

total keragaman data yang dijelaskan dapat diukur dengan:

$$R^2_m = 1 - (e_1^2 + e_2^2) \dots\dots\dots(3)$$

Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur di hitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

Dalam hal ini dua persamaan tersebut adalah:

$$Y_1 = \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + e_1 \dots\dots\dots (4)$$

$$Y_2 = \beta_3 \text{Ln}X_1 + \beta_4 \text{Ln}X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

- Y<sub>1</sub> = Tingkat pengangguran
- Y<sub>2</sub> = Tingkat kemiskinan
- X<sub>1</sub> = Belanja Modal
- X<sub>2</sub> = Upah minimum kabupaten/kota
- e<sub>1</sub>,e<sub>2</sub> = Variabel pengganggu (*error*)
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub>, β<sub>5</sub> = koefisien dari masing-masing variabel

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengaruh UMK dan belanja modal terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di kawasan Sarbagita. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) dengan menggunakan program SPSS terhadap model persamaan. Koefisien jalur diperoleh melalui beberapa tahapan yang diselesaikan melalui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pengaruh Belanja Modal dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran

**Tabel 5 Pengaruh Belanja Modal dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.626	4.691		7.382	.000
	LN_BM	-.558	.215	-.365	-2.593	.012
	LN UMK	-1.258	.447	-.396	-2.816	.007

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

Pengujian model 1 dilakukan untuk melihat pengaruh belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 22.0. Berdasarkan hasil SPSS menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel belanja modal terhadap tingkat pengangguran dengan signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$  (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, hal ini berarti setiap kenaikan satu miliar rupiah pada belanja modal menyebabkan penurunan satu persen pada tingkat pengangguran. Hasil pengujian variabel UMK terhadap tingkat pengangguran yang memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$  (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, hal ini berarti setiap kenaikan satu juta UMK menyebabkan penurunan satu persen pada pengangguran. Maka model persamaan regresi 1 dapat disajikan sebagai berikut :

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,488} = 0,715$$

$$\hat{Y}_1 = - 0,365 \text{ Ln}X_1 - 0,396 \text{ Ln}X_2 + 0,715$$

Keterangan :

- $\hat{Y}_1$  = tingkat pengangguran
- $X_1$  = belanja modal
- $X_2$  = UMK
- $e_1$  = variabel penganggu

**2) Pengaruh Belanja Modal, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan**

**Tabel 6 Pengaruh Belanja Modal, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	64.069	8.467		7.567	.000
	LN_BM	-.972	.285	-.504	-3.409	.001
	LN_UMK	-2.330	.598	-.583	-3.897	.000
	PENGANGGURAN	-.909	.177	-.722	-5.123	.000

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

Pengujian model 2 dilakukan untuk melihat pengaruh belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 22.0. Berdasarkan hasil SPSS menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti setiap kenaikan satu miliar pada belanja modal menyebabkan penurunan satu persen pada tingkat kemiskinan. Hasil pengujian variabel UMK terhadap tingkat kemiskinan yang memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa tingkat UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti setiap kenaikan satu juta pada UMK menyebabkan penurunan satu persen pada tingkat kemiskinan. Pada hasil pengujian

variabel tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti setiap kenaikan satu persen pada tingkat pengangguran menyebabkan penurunan satu persen pada tingkat kemiskinan. Maka model persamaan regresi 2 dapat disajikan sebagai berikut :

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,511} = 0,699$$

$$\hat{Y}_2 = -0,504 \text{ Ln}X_1 - 0,583 \text{ Ln}X_2 - 0,722 Y_1 + 0,699$$

Keterangan :

$\hat{Y}_2$  = tingkat kemiskinan

$Y_1$  = tingkat pengangguran

$X_1$  = belanja modal

$X_2$  = UMK

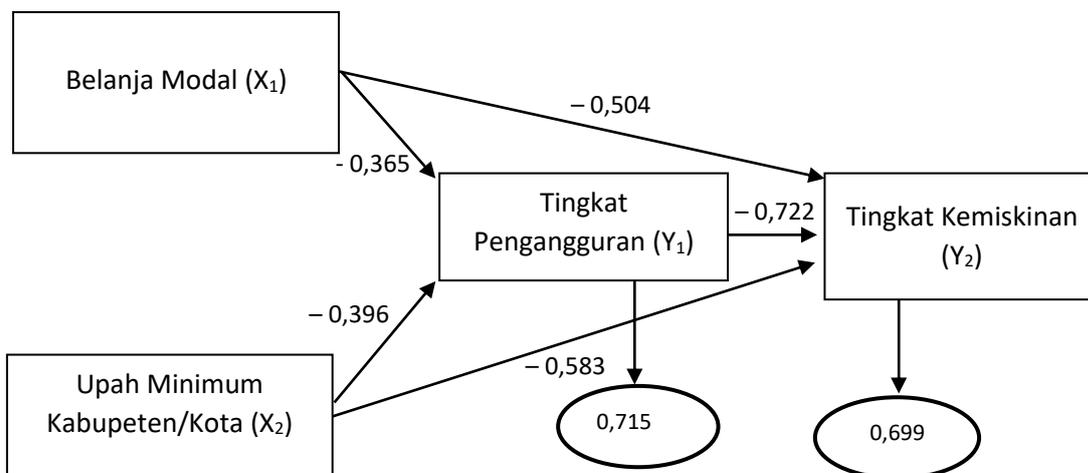
$e_2$  = variabel penganggu

total keragaman data yang dijelaskan dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (e_1^2 + e_2^2) \dots \dots \dots (6) \\ &= 1 - (0,715)^2 - (0,699)^2 \\ &= 1 - (0,511225) - (0,488601) \\ &= 1 - 0,249785046 \\ &= 0,7502 \end{aligned}$$

koefisien determinasi total sebesar 0,7502 mempunyai arti bahwa sebesar 75,02 persen informasi yang terkandung dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk, sisanya yaitu 24,98 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang terbentuk.

Melalui hasil regresi diatas maka dapat disajikan diagram hasil analisis jalur sebagai berikut :



**Gambar 4.1 Diagram Hasil Analisis Jalur**

**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

**Pengujian Pengaruh Langsung**

**1) Pengaruh langsung belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan Sarbagita.**

Hubungan negatif antara variabel belanja modal terhadap tingkat pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini berarti pada kawasan Sarbagita proporsi belanja modal lebih besar dari belanja rutin, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik seperti pembangunan fasilitas pelayanan publik untuk masyarakat pun dapat meningkat dan sehingga akhirnya banyak lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang terjadi di masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kresnandra (2013) mengatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukannya bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran.

**2) Pengaruh langsung upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran pada kawasan Sarbagita.**

Hubungan negatif antara variabel upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini berarti pada kawasan Sarbagita upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan oleh pemerintah dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada pada kawasan tersebut. Peningkatan upah minimum yang relatif stabil akan memberikan kemampuan pada perusahaan, sektor ekonomi dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mengembangkan usahanya. Ketika usaha yang ada meningkat dan berkembang, maka perusahaan atau usaha dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran (Priastiwi dan Herniawati, 2019). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahmah (2018), selain itu Wijayanti dan Karmini (2014) juga menyatakan bahwa dengan naiknya tingkat upah maka dorongan untuk memperoleh pekerjaan atau mencari pekerjaan oleh masyarakat akan semakin banyak sehingga akan mampu untuk menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi.

**3) Pengaruh langsung belanja modal terhadap tingkat kemiskinan pada kawasan Sarbagita.**

Hubungan negatif signifikan antara variabel belanja modal terhadap tingkat kemiskinan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang berarti antara kenaikan pengeluaran belanja modal memberikan penurunan tingkat kemiskinan di kawasan Sarbagita, hal ini disebabkan oleh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dalam

pelaksanaannya juga memerlukan tenaga kerja, sehingga hal tersebut dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun dan diperolehnya penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dan tentunya mengurangi tingkat kemiskinan kemiskinan (Santi, 2016). Hasil penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian dari Sendouw,dkk (2017) dan Mustaqimah,dkk (2017) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

**4) Pengaruh langsung upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan pada kawasan Sarbagita.**

Hubungan negatif signifikan antara variabel upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan yang diperoleh dalam penelitian ini berarti peningkatan UMK setiap tahunnya oleh pemerintah memberikan dampak yang baik pada penduduk yang kurang mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencari pekerjaan serta ketentuan penetapan UMK ini sesuai dengan tujuan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan Sarbagita. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Putri dan Yuliarmi (2013) dan Prastyo (2010), yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

**5) Pengaruh langsung tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada kawasan Sarbagita.**

Hubungan negatif dan signifikan antara variabel tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan yang diperoleh dalam penelitian ini berarti peningkatan tingkat pengangguran belum tentu meningkatkan pula tingkat kemiskinan. Fenomena ini banyak ditemui di daerah perkotaan dimana seseorang yang menganggur dalam sebuah rumah tangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong penganggur tersebut, sehingga dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Pada kelompok bukan angkatan kerja (pelajar/mahasiswa) yang menamatkan pendidikan dan masuk dalam kelompok angkatan kerja biasanya terjadi hal tersebut karena mereka tidak serta merta langsung bekerja, terkadang masa tunggu mendapatkan pekerjaan relatif lama. Selain itu ada juga yang sengaja menarik diri dari dunia kerja karena alasan mencari pekerjaan lebih baik. Kejadian tersebut akan menciptakan pengangguran (terutama terjadi pengangguran terdidik). Walaupun terjadi pengangguran, kehidupan kelompok ini masih ditanggung oleh anggota keluarga lain yang berpenghasilan relatif tinggi, dan dengan demikian rata-rata pendapatan masih berada di atas garis kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Yacoub (2012) dan Usman, Diramita (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

### **Pengujian Pengaruh Tidak Langsung**

#### **Pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran.**

Oleh karena  $z$  hitung sebesar 2,316 lebih besar dari 1,96 berarti tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening dari variabel belanja modal ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) di kawasan Sarbagita, atau dengan kata lain belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran.

#### **Pengaruh tidak langsung UMK terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran.**

Oleh karena  $z$  hitung sebesar 2,468 lebih besar dari 1,96 berarti tingkat pengangguran ( $Y_1$ ) merupakan variabel intervening dari variabel UMK ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y_2$ ) di kawasan Sarbagita, atau dengan kata lain UMK berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dapat diuraikan beberapa implikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

Belanja modal sebagian besar yang dikeluarkan sudah menuju pada pengeluaran yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pengeluaran ini sudah memberikan dampak yang baik bagi kawasan Sarbagita meskipun pada beberapa wilayah belum secara maksimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kresnandra (2013) mengatakan bahwa dalam

penelitian yang dilakukannya bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Sendouw,dkk (2017) dan Mustaqimah,dkk (2017) juga menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Ketentuan upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan di kawasan Sarbagita juga sudah memberikan dampak yang baik terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, hal ini menyebabkan masyarakat meningkatkan keinginan untuk bekerja, meskipun tingkat pengangguran masih tinggi di kalangan pelajar terutama bagi mereka yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahmah (2018), selain itu Wijayanti dan Karmini (2014) juga menyatakan bahwa dengan naiknya tingkat upah maka dorongan untuk memperoleh pekerjaan atau mencari pekerjaan oleh masyarakat akan semakin banyak sehingga akan mampu untuk menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi. Putri dan Yuliarmi (2013) dan Prastyo (2010) juga menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Bila dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran meskipun tingkat pengangguran naik tingkat kemiskinan cenderung turun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Yacoub (2012) dan Usman, Diramita (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

## **SIMPULAN**

- 1) Belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif (signifikan) terhadap tingkat pengangguran pada kawasan Sarbagita.

- 2) Belanja modal, upah minimum kabupaten/kota, dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan pada kawasan Sarbagita.
- 3) Belanja modal dan upah minimum kabupaten/kota pada kawasan Sarbagita berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui tingkat pengangguran.

### **SARAN**

- 1) Disarankan kepada pemerintah daerah Provinsi Bali untuk mengkaji kembali mengenai kawasan Sarbagita, mengingat tingkat pengangguran yang ada masih dalam kategori tinggi terutama terjadi di kalangan masyarakat yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan.
- 2) Disarankan kepada masing-masing pemerintah daerah selain di kawasan Sarbagita untuk lebih menggali potensi daerahnya sehingga nantinya pemanfaatan dari pengeluaran belanja modal yang digunakan lebih tepat sasaran sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

### **REFERENSI**

- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakilia, A. M. 2013. Nexus Between Publik Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*. 2(4). Hal: 2383-2395.
- Bagiada, Made dan Anak Agung Istri Marhaeni. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penduduk Miskin Di Kawasan SARBAGITA. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.7(3), hal. 560-591.

- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1), hal.1-6.
- Chinweoke, N., Ray, N., and Paschal, N. O. 2014. Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The Macrotheme Review*, 3(7), 79-87.
- Dalamagas, Basil. 2010. Publik Sector and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288
- Dao, Minh Quang. 2013. Factor Endowment, Human Capital, and Inequality in Developing Countries. *Journal of Economic Studies*, 40(1), hal. 98-106. USA: Eastern Illinois University.
- Dastidar, Ananya G. income Distribution and Structural. Asnformasion: Empirical Evidence from Developed and Developed and Developing Countries. *Seoul Journal of Economics*. Vol. 25, No. 1, pp 25-26, 2012.
- Hariwan, Peggy dan Ayu Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), hal.72-82.
- Ikejiaku, Brian Vincent. 2009. The Concept Poverty towards Understanding in the Context of Developing Countries Poverty qua Poverty. *Journal of Sustainable Development*. 2(2).
- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. Sustainable Development Goals (Sdgs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6(2). Halaman: 154-272.
- Kaur, Masjinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 8(2).
- Kresnandra, Ngurah Agung dan Adi Erawati. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat pengangguran dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 544-56.
- Kotambunan, Lavenia, Sutomo Wim Palar, dan Richard L.H Tumilaar. 2016. Analysis Effect Of Capital Expenditure And Human Development Index (Hdi) On Poverty In North Sulawesi (In Years 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah*. 16(1). Halaman: 925-933
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2013. Analisa Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 1(1).

- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1): 1-11.
- Manning, Chris And P.N Junankar. 1998. *Choosy Youth Or Unwanted Youth? A Survey Of Unemployment. Bulletin Of Indonesia Economic Studies (BIES)*. 34 (1), pp:55-95
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, I Ketut Djayastra dan Murjana Yasa. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 12(1), 101-110.
- Miranti, Riyana. 2010. Poverty in Indonesia 1984-2002:the impact of growth and changes in inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (1), pp.79-97.
- Miranti, Riyana., Alan Duncan, and Rebecca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studie*. 50(3). Hal: 461-482.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. 2012. Effects of Publik Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*. 1(7). Hal: 1-15.
- Putra, I Kadek Yoga Darma dan Wajan Murjana Yasa. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMR Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 7(11), hal 2461-2489.
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. Pengaruh *Gini Ratio*, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekono Mi Pada IndeksPembangunan Manusia Kabupaten /KotaDi Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*, 10(1). pp. 45-55.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Santi, Prima Rosita Arini. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB*. 2(2). Halaman: 33-50.
- Seran, Srilius. 2017. Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2). Halaman: 59-71.

- Silva, Indunil De and Sudarno Sumarto. 2014. Does Economic Growth Really Benefit The Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Economic Indonesian Studies*, 50 (2), pp.227-242.
- Verner. Dorte. 2006. Rular Poor in Rich Rular Areas: Poverty in Rular Argentina. *World Bank Policy Research Working Paper 4096*.
- Wijayanti, Ni Nyoman Setya Ari dan Ni Luh Karmini.2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 3 (10), hal 460-466.
- Wahyuningsih. 2017. Millenium Develompent Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 11(3). Halaman: 390 – 399.
- Widianto, Andri, Erni Unggul Sedyta Utami, dan Asrofi Langgeng Nurmansyah. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan BelanjaModal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal).*Jurnal Research Accounting Politeknik Tegal*. 5(2). Halaman: 170-176.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadapTingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*. 8(3), hal 176 – 185.
- Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama dan Marhaeni. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 10(2), 68-75.
- Yasa, I Komang Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 63-71.
- Yustie, Renta Dan Unggul Heriqbaldi. 2015. Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (2007-2011). . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(1). Halman: 7-16.
- Yusuf, Arief Anshory and Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3), pp.323-348.
- Zakaria. 2015. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Pontianak. *Jurnal Curvanomic*. 4(4). Halaman 52-64.